

LAMPIRAN XLI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026



RENCANA KERJA
KECAMATAN JENAWI
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2029 serta mengacu pada program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029, pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Rencana Kerja PD Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA-PD Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENJA-PD Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026.

Jenawi, September 2025
CAMAT JENAWI



ARDIANSYAH, S.S.T.P., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197907091998101002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Landasan Hukum	I.2
1.3 Maksud dan Tujuan	I.3
1.4 Sistematika Penulisan	I.4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jenawi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jenawi	II.1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jenawi	II.6
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jenawi	II.16
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II.18
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II.23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	III.1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	III.3
3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah	III.6
3.4. Pengukuran Kinerja	III.6
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JENAWI	
4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Jenawi.....	IV.1
4.2 Data Indikatif Kecamatan Jenawi	IV.2
4.3 Sumber Dana Yang Dibutuhkan Kecamatan Jenawi.....	IV.3
4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jenawi	IV.15
4.4 Program Kecamatan Jenawi yang mendukung Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2026	IV.15
BAB V PENUTUP	
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	V.1
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	V.1
5.3 Rencana Tindak lanjut.....	V.1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Persandingan Alokasi Dana Renja dengan APBD Perubahan Tahun 2024 dan Renja 2025 dan APBD tahun 2025.....	II.1
Tabel 2.2 Realisasi APBD Program,Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 Tribulan II	II.4
Tabel 2.3 Persandingan Realisasi anggaran Program Tahun 2023 dan 2024 Kecamatan Jenawi	II.5
Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Jenawi dan Pencapaian Renstra Kecamatan Jenawi s/d Tahun 2025	II.9
Tabel 2.5 Capaian Indikator Tujuan,Sasaran dan Program Kecamatan Jenawi Tahun 2024 dan Tahun 2024 Tribula II.....	II.15
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Sasaran strategis (IKU) Tahun 2024	II.16
Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Jenawi	II.17
Tabel 2.8 Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar	II.19
Tabel 2.9 Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar	II.23
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan dan Sasaran Target Kecamatan Jenawi Tahun tahun 2026	III.5
Tabel 3.2 Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan	III.7
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jenawi Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar	IV.4
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jenawi	IV.15
Tabel 4.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026	IV.15

BAB I PENDAHULUAN

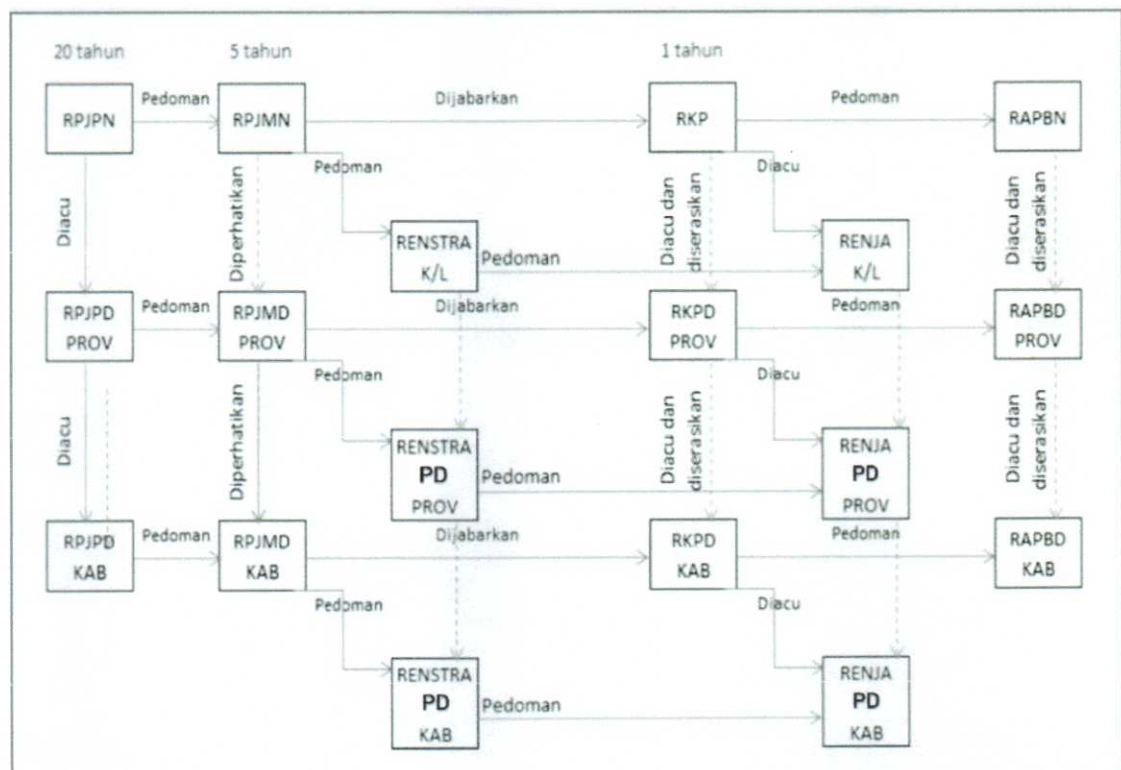
1.1 Latar Belakang

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis serta atas bawah dan bawah atas. Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Jenawi untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Karanganyar dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun di Tahun 2026. Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181).
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28).
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
2. Sebagai bahan acuan dan arah bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan yang ingin dicapai dan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini antara lain:

- Kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
- Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya;
- Arah kebijakan pengawasan dapat lebih profesional serta lebih nyata dapat dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Rencana Kerja Kecamatan Jenawi disajikan dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab memiliki sub bab sebagai perincian dari bab-bab tersebut. Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja Kecamatan Jenawi, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD.
- 1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
- 1.3 Maksud dan Tujuan
Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Jenawi.
- 1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Jenawi, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JENAWI TAHUN 2024

- Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Jenawi tahun lalu (2024).
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jenawi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jenawi
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jenawi
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jenawi
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JENAWI

Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan dan tidak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JENAWI
TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jenawi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jenawi

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Kecamatan Jenawi berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Jenawi tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 dan realisasi APBD Kecamatan Jenawi.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jenawi tahun lalu adalah penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra tahun 2024-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.1.1. Evaluasi Anggaran

a. Perbandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada Tahun 2024 dan 2025 Kecamatan Jenawi telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD
Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Kecamatan
Jenawi

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
	Kec.Jenawi	2.390.531.349	2.420.531.349	101,25	2.404.141.613	2.629.141.613	109,36
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.245.518.749	2.272.018.749	101,18	2.321.492.213	2.542.992.213	109,54
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.955.200	7.019.200	100,92	12.726.050	14.806.100	116,34
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.612.800	5.676.800	101,14	11.703.000	11.703.000	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.342.400	1.342.400	100,00	1.023.050	3.103.100	303,32
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.608.724.949	1.608.724.949	100,00	1.778.535.213	1.943.535.213	109,28
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.608.724.949	1.608.724.949	100,00	1.778.535.213	1.943.535.213	109,28
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.800.000	23.800.000	100,00	23.800.000	68.000.000	285,71
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.800.000	23.800.000	100,00	23.800.000	68.000.000	285,71
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.118.000	90.123.000	100,01	43.620.950	56.271.200	129,00

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.511.600	2.511.600	100,00	2.369.900	2.369.900	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.242.100	18.247.100	100,03	12.153.850	13.942.000	114,71
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.034.800	19.034.800	100,00	7.570.700	9.427.200	124,52
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.845.000	5.845.000	100,00	2.784.000	3.089.600	110,98
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	460.000	460.000	100,00	0	0	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.635.000	40.635.000	100,00	17.500.000	26.200.000	149,71
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.389.500	3.389.500	100,00	1.242.500	1.242.500	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.152.500	35.152.500	100,00	12.500.000	2.500.000	0,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.000.000	19.000.000	100,00	0	0	0,00
	Pengadaan Mebel	1.552.500	1.552.500	100,00	0	0	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.600.000	14.600.000	100,00	12.500.000	2.500.000	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.600.000	415.560.000	99,27	421.420.000	421.420.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.400.000	20.400.000	100,00	20.400.000	20.400.000	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	398.200.000	395.160.000	99,24	401.020.000	401.020.000	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.168.100	91.639.100	147,41	28.890.000	36.459.700	126,20
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.864.000	32.864.000	100,00	25.320.000	25.920.000	102,37
	Pemeliharaan Mebel	2.625.000	2.625.000	100,00			0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000	6.500.000	100,00	3570000	3570000	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.179.100	49.650.100	246,05	0	6969700	0,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.230.100	5.230.100	100,00	3.126.650	3.126.650	100,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.230.100	5.230.100	100,00	3.126.650	3.126.650	100,00
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.764.400	2.764.400	100,00	1.714.400	1.714.400	100,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.465.700	2.465.700	100,00	1.412.250	1.412.250	100,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	44.317.300	47.817.300	107,90	12.004.750	12.004.750	100,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	44.317.300	47.817.300	107,90	12.004.750	12.004.750	100,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.684.000	6.684.000	100,00	4.514.000	4.514.000	100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.633.300	41.133.300	109,30	7.490.750	7.490.750	100,00

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.560.000	32.560.000	100,00	24.600.000	24.600.000	100,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.560.000	32.560.000	100,00	24.600.000	24.600.000	100,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32.560.000	32.560.000	100,00	24.600.000	24.600.000	100,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47.389.000	47.389.000	100,00	31.398.000	32.398.000	103,18
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	47.389.000	47.389.000	100,00	31.398.000	32.398.000	103,18
	Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6.000.000	6.000.000	100,00	2500000	1500000	0,00
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	32.875.000	32.875.000	100,00	26.398.000	26.398.000	100,00
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	8.514.000	8.514.000	100,00	2.500.000	4.500.000	180,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.516.200	15.516.200	100,00	11.520.000	14.020.000	121,70
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.516.200	15.516.200	100,00	11.520.000	14.020.000	121,70
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.379.000	8.379.000	100,00	5.846.000	8.346.000	142,76
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.137.200	7.137.200	100,00	5.674.000	5.674.000	100,00

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan bulan Maret 2025 (Triwulan I) yang masih menggunakan anggaran yang belum dilakukan efisiensi adalah sebagai berikut

Tabel 2.2
Realisasi APBD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)
Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	2024			2025		
		APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.272.018.749	2.230.045.219	98,15	2.506.571.763	1.054.417.444	42,07
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.019.200	7.019.200	100,00	9.745.650	1.437.650	14,75
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.676.800	5.676.800	100,00	7.244.900	971.950	13,42
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.342.400	1.342.400	100,00	2.500.750	465.700	18,62
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.608.724.949	1.570.151.492	97,60	1.943.535.213	801.180.136	41,22
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.608.724.949	1.570.151.492	97,60	1.943.535.213	801.180.136	41,22

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.800.000	23.630.000	99,29	68.000.000	67.320.000	99,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.800.000	23.630.000	99,29	68.000.000	67.320.000	99,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.123.000	90.123.000	100,00	37.220.900	10.015.050	26,91
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.511.600	2.511.600	100,00	2.369.900	904.600	38,17
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.247.100	18.247.100	100,00	11.960.700	3.968.650	33,18
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.034.800	19.034.800	100,00	9.427.200	1.881.800	19,96
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.845.000	5.845.000	100,00	2.471.600	703.000	28,44
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	460.000	460.000	100,00	0		0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.635.000	40.635.000	100,00	10.000.000	2.000.000	20,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.389.500	3.389.500	100,00	991.500	557.000	56,18
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.152.500	35.152.500	100,00	0	0	0,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.000.000	19.000.000	100,00	0	0	0,00
	Pengadaan Mebel	1.552.500	1.552.500	100,00	0	0	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.600.000	14.600.000	100,00	0	0	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	415.560.000	415.266.484	99,93	421.420.000	163.994.108	38,91
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.400.000	20.106.484	98,56	20.400.000	10.274.108	50,36
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	395.160.000	395.160.000	100,00	401.020.000	153.720.000	38,33
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.639.100	88.702.543	96,80	26.650.000	10.470.500	39,29
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.864.000	29.927.443	91,06	25.920.000	10.470.500	40,40
	Pemeliharaan Mebel	2.625.000	2.625.000	100,00			0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000	6.500.000	100,00	730000		0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.650.100	49.650.100	100,00			0,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.230.100	5.230.100	100,00	2.484.950	600.350	24,16
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.230.100	5.230.100	100,00	2.484.950	600.350	24,16
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.764.400	2.764.400	100,00	1.354.700	129.850	9,59
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.465.700	2.465.700	100,00	1.130.250	470.500	41,63
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	47.817.300	47.817.300	100,00	9.675.900	6.114.200	63,19

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	47.817.300	47.817.300	100,00	9.675.900	6.114.200	63,19
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.684.000	6.684.000	100,00	4.514.000	4.514.000	100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.133.300	41.133.300	100,00	5.161.900	1.600.200	31,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.560.000	32.560.000	100,00	24.000.000	10.500.000	43,75
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.560.000	32.560.000	100,00	24.000.000	10.500.000	43,75
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32.560.000	32.560.000	100,00	24.000.000	10.500.000	43,75
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47.389.000	47.389.000	100,00	19.900.000	0	0,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	47.389.000	47.389.000	100,00	19.900.000	0	0,00
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6.000.000	6.000.000	100,00			0,00
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	32.875.000	32.875.000	100,00	16.300.000	0	0,00
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	8.514.000	8.514.000	100,00	3.600.000	0	0,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.516.200	15.516.200	100,00	9.172.000	1.540.000	16,79
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.516.200	15.516.200	100,00	9.172.000	1.540.000	16,79
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.379.000	8.379.000	100,00	4.672.000	1.540.000	32,96
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.137.200	7.137.200	100,00	4.500.000		0,00

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 2.420.531.349,00 (*dua milyar empat ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah*) atau 98,27 %, lebih tinggi dibanding tahun 2023 sebesar 95,12%. Sedangkan capaian sampai dengan Twiwulan I Tahun 2025 adalah Rp. 1.073.171.994,00 atau 40,82% dari pagu anggaran Rp. 2.629.141.613,00.

Tabel 2.3
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

NO	PROGRAM	2023			2024		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.261.177.624	2.136.748.807	94,50	2.272.018.749	2.230.045.219	98,15
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.053.700	7.053.700	100,00	5.230.100	5.230.100	100

3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	128.655.600	128.127.600	99,59	47.817.300	47.817.300	100
4	Program Koordinasi Ketentaraman dan Ketertiban Umum	32.698.100	32.698.100	100,00	32.560.000	32.560.000	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	123.528.300	123.020.800	99,59	47.389.000	47.389.000	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.295.200	17.295.200	100,00	15.516.200	15.516.200	100
	Presentase Realisasi	2.570.408.524	2.444.944.207	95,12	2.420.531.349	2.378.557.819	98,27
	Rata -rata Realisasi 6 Program			98,946			99,69

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jenawi

Kecamatan Jenawi merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jenawi dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain:

- Meningkatnya Nilai Sakip
- Meningkatnya Indeks Desa Membangun
- Meningkatnya Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai targetnya
- Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
- Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
- Meningkatnya Persentase wilayah dalam keadaan kondusif
- Meningkatnya Persentase Kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana
- Meningkatnya Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDDes sesuai ketentuan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Jenawi meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain:

1. Lingkungan Internal

Kekuatan:

- Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa
- Terdapatnya budaya gotong-royong yang terus dilestarikan dan telah ditetapkan payung hukumnya

- Terdapatnya organisasi/lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan berdasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 26 Tahun 2006
- Terdapatnya Tri Kerukunan Beragama
- Terdapatnya tokoh agama dari masing-masing agama
- Tersedianya dana untuk membina tokoh agama
- Adanya Undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas keamanan daerah
- Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah

Kelemahan:

- Masih cukup banyak penduduk miskin
- Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja
- Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama khususnya penerapan dalam kehidupan bermasyarakat
- Masih rendahnya kualitas SDM yang mendukung penyelenggaraan kamtibmas
- Kurangnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan terutama keamanan lingkungan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang:

- Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi OPD
- Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
- Adanya dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat
- Terdapat lembaga/organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang bertugas di bidang keagamaan
- Terdapat kehidupan toleransi agama yang telah dibina dengan intensif
- Terdapatnya kerjasama institusional yang menunjang ketertiban dan keamanan masyarakat
- Terdapatnya usaha ketahanan bersama antara masyarakat dengan aparat keamanan melalui keterpaduan dalam penyelesaian masalah
- Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu demokrasi dan masalah HAM

Ancaman:

- Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan desa
- Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam memberdayakan masyarakat desa
- Adanya kecenderungan mental/akhlak masyarakat menurun
- Munculnya paham keagamaan yang ekstrim sehingga menimbulkan konflik intern dan ekstern umat beragama
- Sulitnya mencegah dan menanggulangi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
- Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jenawi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah

serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

TABEL 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Jenawi dan Pencapaian Renstra
Kecamatan Jenawi s/d Tahun 2025 Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Jenawi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11=(10/4)
	Bidang Kewilayahan									
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Na	Na	95	95	100	95	42,07	44,28
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	33,33	33,33
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD		5	5	5	100	6	2	33,33
7.01.01.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3	3	3	100	15	9	60
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	97,60	97,60	100	41,22	41,22
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN		15	14	14	100	14	14	100

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		34	34	34	100	34	34	100
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	jumlah penyediaan komponen listrik dan instalasi kantor		12	12	12	100	12	5	33,33
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistic kantor	Tersedianya bahan logistic kantor, dan alat kebersihan kantor		12	12	12	100	12	5	33,33
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan		12	12	12	100	12	4	26,67
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat rapat koordinasi dan perjalanan dinas kantor		12	12	12	100	12	4	26,67
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		0	12	12	100	12	5	26,67
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	0	0
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0	1	1	100	0	0	0
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	1	1	100	0	0	0

7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin yang disediakan		3	3	3	100	2	0	0
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	38,91	38,91
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan listrik		12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor		12	12	12	100	12	5	41,66
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	39,29	39,29
7.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipeliharakan dan dibayar pajaknya		3	4	4	100	4	1	25
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara		0	8	8	100	0	0	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		8	5	5	100	2	0	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara		1	2	2	100	1	0	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	85,25	85,225	85,25	86,25	101,17	85,25	50,95	50,95
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak	Terselenggaranya urusan Pemerintahan		100	100	100	100	100	50,95	50,95

	dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standard Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya survey kepuasan masyarakat		2	2	2	100	2	1	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12	12	12	100	12	5	41,67
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosetase Lembaga Kemasyarakatan aktif	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	100	100	100	100	50,48	50,48
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		7	7	7	100	7	7	100
7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12	12	12	100	12	5	41,67
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	100	100	100	100	100	100	36,96	36,96
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ,tantara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia		12	12	12	100	12	5	41,67

	Vertikal di Wilayah Kecamatan	,tantara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100	Na	100	100	100	100	0	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100	0	0
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		120	90	90	100	0	0	0
7.01.05.2.01.02	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		270	200	200	100	180	0	0
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Antar suku dan intrasuku, umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional dan nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Antar suku dan intrasuku, umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional dan nasional		120	120	120	100	90	0	0

7.01.06	PROGRAM, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan Tertib Perda	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.06.2.01. 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		9	9	9	100	9	9	100
7.01.06.2.01. 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok Kepala Desa dan Perangkat desa		9	9	9	100	9	0	0

Tabel 2.5
Capaian Indikator Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan
Jenawi Tahun 2024 dan Tahun 2025 Tribulan II

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN		REALISASI CAPAIAN	
				2024	2025	2024	2025 TW II
1	Tujuan 1 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65	Tidak dipakai	85,74	Tidak dipakai
2	Tujuan 2 : Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	%	8,52	Tidak dipakai	9,59	Tidak dipakai
3	Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	72	72,25	73,03	0
4	Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,71 2		0,7078	
5	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Standar Operasional Prosedur yang diimplementasikan	%	Na	96,5	Na	
6	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM	Nilai		86,4	86,25	83
7	Program Penunjang Urusan Pemeintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai targetnya	%	96	Tidak dipakai	96	Tidak dipakai
		Nilai SAKIP	Nilai	72	72,25	73,03	0
8	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,25	85,3	86,25	35,77
		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%		100		
9	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	100
10	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam keadaan Kondusif	%	100	100	100	100
11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	%	100	100	100	0
12	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100	100

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 dan 2025 (Smt 1)

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2024			2025		
				TARGET	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)
1	Meningkatkan Kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	72	73,05	101,458	Tidak dipakai		
2	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,712	0,7078	99,4101	Tidak dipakai		
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	Nilai	85,25	86,25	101,173	86,4	83	96

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jenawi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Beberapa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan program/kegiatan di atas antara lain adalah :

- 1. Belum Optimalnya penunjang kinerja pelayanan dalam dukungan pelaksanaan pelayanan pada kecamatan**
belum optimalnya Pemerataan beban kerja, ketersediaan SDM aparatur belum sesuai kebutuhan, kompetensi SDM belum merata pada seluruh unit kerja dalam memberikan pelayanan, ketersediaan Sarpras masih kurang dalam menunjang kinerja pelayanan di Kecamatan dan Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan pelayanan belum diterapkan dengan baik
- 2. Belum Optimalnya penerapan standar pelayanan publik**
Kecamatan belum menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dan alur kerja sesuai dengan standarnya, sehingga pelaksanaan tugas sering bersifat tidak konsisten. Akibatnya, koordinasi internal maupun eksternal belum optimal.
- 3. Belum Optimalnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa**
Pembangunan kelurahan belum selaras dengan target pembangunan daerah. Belum optimalnya dukungan kelembagaan pada desa dalam mendukung program prioritas daerah
- 4. Belum Optimalnya penyelenggaraan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum pada lingkungan masyarakat**
Jangkauan wilayah belum seimbang dengan ketersediaan SDM. Terdapat titik wilayah rawan sosial, dan keamanan yang masih belum optimal diselesaikan.

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Kecamatan Jenawi

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Belum Optimalnya penunjang kinerja pelayanan dalam dukungan pelaksanaan pelayanan pada kecamatan	a. Ketersediaan SDM aparatur belum sesuai kebutuhan b. Kompetensi SDM belum merata pada seluruh unit kerja dalam memberikan pelayanan c. Sistem informasi pelayanan belum terintegrasi atau masih manual. d. Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan pelayanan belum diterapkan dengan baik e. Belum ada standar pelayanan minimal (SPM) yang diterapkan secara konsisten
		Belum Optimalnya penerapan standar pelayanan publik	a. Belum adanya sistem tata kelola pelayanan publik yang berbasis standar secara menyeluruh, mencakup aspek regulasi, kapasitas SDM, sistem pengawasan, dan partisipasi masyarakat, sehingga penerapan standar pelayanan belum menjadi budaya kerja yang konsisten di seluruh unit pelayanan.
2	Belum optimalnya kualitas pelayanan Terhadap masyarakat	Belum Optimalnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	a. Penerapan standar pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal b. dukungan sarpras pelayanan yang bersifat kemitraan berada diluar jangkauan kecamatan
		Belum Optimalnya penyelenggaraan pelayanan ketenteraman dan	a. Jangkauan wilayah belum seimbang dengan ketersediaan SDM

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		ketertiban umum pada lingkungan masyarakat	b. Terdapat titik wilayah rawan sosial, dan keamanan yang masih belum optimal diselesaikan c. Pemahaman terhadap implementasi Penegakan PERDA belum merata

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Jenawi dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Jenawi dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap Ranwal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Kecamatan Jenawi Tahapan kegiatan review yang dilakukan adalah :

- 1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- 2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025- 2029. Rencana Kerja Kecamatan Jenawi berdasarkan RKPD Kabupaten Karanganyar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Jenawi.

Review rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai proses rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dijelaskan pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026
Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kecamatan				2.801.486.092					2.702.591.000	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Jenawi	Nilai SAKIP	73,10 nilai	2.705.364.292	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Jenawi	Nilai SAKIP	73,10 nilai	2.559.391.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Jenawi	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai standar	100%	12.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Jenawi	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai standar	100%	12.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Jenawi	Prosentase administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	100%	1.965.500.292	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Jenawi	Prosentase administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	100%	1.950.291.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Jenawi	Prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	100%	36.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Jenawi	Prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	100%	36.600.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Jenawi	Prosentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran	100%	103.864.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Jenawi	Prosentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran	100%	83.120.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Jenawi	Prosentase sarana prasarana sesuai standar	100%	62.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Jenawi	Prosentase sarana prasarana sesuai standar	100%	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Jenawi	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	434.400.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Jenawi	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	406.480.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Jenawi	Prosentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	100%	90.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Jenawi	Prosentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	100%	67.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Jenawi	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	100%	4.271.800	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Jenawi	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	100%	4.500.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec.Jenawi	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	12 Kegiatan	4.271.800	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec.Jenawi	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	12 Kegiatan	4.500.000	

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Jenawi	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	15.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Jenawi	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	16.650.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang dibina	7 lembaga	15.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang dibina	7 lembaga	16.650.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100%	6.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100%	4.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Jenawi	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketenteraman dan ketertiban umum	9 Wilayah	6.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Jenawi	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketenteraman dan ketertiban umum	9 Wilayah	4.000.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Jenawi	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	100%	63.850.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Jenawi	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	100%	91.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Jenawi	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	4 kegiatan	63.850.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Jenawi	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	4 kegiatan	91.000.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Jenawi	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDDes yang sesuai ketentuan	100%	7.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Jenawi	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDDes yang sesuai ketentuan	100%	27.050.000	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Jenawi	Persentase desa yang memiliki fasilitas pemerintahan desa sesuai ketentuan	100%	7.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Jenawi	Persentase desa yang memiliki fasilitas pemerintahan desa sesuai ketentuan	100%	27.050.000	
--	--	------------	---	------	-----------	--	------------	---	------	------------	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jenawi.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Jenawi. Namun dalam proses ini Kecamatan Jenawi mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Jenawi terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Jenawi.

Tabel 2.9
Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Beberapa capaian yang telah terwujud dan permasalahan yang dihadapi menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun berikutnya.

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***“Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.”*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***“Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional”*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;

7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification/LSFF*);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras dengan teknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanian berkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, perlindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui program inkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;

5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indeks Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskal Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
- 2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
- 3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

- 1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;

- 2) Meningkatkan kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
- 3) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender;
- 4) Meningkatkan ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
- 5) Meningkatkan riset dan inovasi;
- 6) Meningkatkan kondusivitas wilayah;
- 7) Meningkatkan pelestarian kebudayaan daerah;
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
- 9) Meningkatkan kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
- 10) Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah;
- 11) Meningkatkan akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
- 12) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional. Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta "Karanganyar Bebas Jeglongan";
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;

14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan modernisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade. *(Ranwal RPJMD hal III-41).*

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran dan Program Renja Kecamatan Jenawi

Tujuan dan sasaran renja Kecamatan Jenawi Tahun 2026 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Jenawi Tahun 2025 - 2029. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Jenawi adalah;

TABEL 3. 1
Tujuan – Sasaran –dan Program (Target Tahun 2026)

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	97,50
2		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	86,40
3			Program Penunjang Urusan Demerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Nilai	73,10

			Daerah Kabupaten/Kota			
4			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100
5			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100
6			Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100
7			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	%	100
8			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDDes yang sesuai ketentuan	%	100

3.3. Tantangan dan Peluang

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi, antara lain:

3.3.1 Tantangan

- 1) Tuntutan Reformasi di berbagai bidang dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
- 2) Tuntutan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal.
- 3) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 4) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.

3.3.2 Peluang

- 1) Perhatian Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan kecamatan dan desa menunjukkan peningkatan yang baik, menjadi peluang meningkatkan kinerja pembangunan.
- 2) Adanya tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan peluang pada kantor Kecamatan Jenawi untuk meningkatkan kinerja.
- 3) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.
- 4) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara Kecamatan Jenawi mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujud tujuan dan sasaran

Kecamatan Jenawi dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program Kegiatan dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Jenawi.

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.4.1. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.2

Keselarasn Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

SASARAN OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JENAWI

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Jenawi

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2026 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2026. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029, Renstra OPD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Jenawi di tahun 2026 adalah sebagaimana tertulis dalam berikut ini:

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1) :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
 - 1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrai Keuangan
 - 1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendidikan dan Petlatihan pegawai Berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1). Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4). Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
 - 5). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7). Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1). Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3). Pengadaan Mebel
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a). Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
 - 1). Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a). Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
 - 1). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2). Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a). Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1). Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a). Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah
 - 1). Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 2). Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, regional dan Nasional
 - 3). Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1). Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - 2). Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 3). Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 4). Fasilitasi Pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat desa
 - 5). Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - 6). Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

4.2 Dana Indikatif Kecamatan Jenawi

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu

4.3 Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Jenawi

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat.

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jenawi Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kecamatan Jenawi						2.036.291.147,00							2.803.473.892,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.036.291.147,00							2.803.473.892,00	
	7	01				KECAMATAN						2.036.291.147,00							2.803.473.892,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Nilai SAKIP	73,22 nilai	73,05	73,05	73,1 nilai	1.969.656.597,00						73,12 nilai	2.705.364.292,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai standar	100 %	100%	100%	100 %	3.399.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Desa	100 %	12.500.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	5 Dok	6 Dok	5 Dok	1.893.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Desa	6 Dok	6.500.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	15Laporan	15 Laporan	1.506.600,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Desa	15 Laporan	6.000.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100%	100%	100 %	1.490.291.147,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Administrasi Keuangan	100 %	1.965.500.292,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang /bulan	13 Orang /bulan	14 Orang /bulan	14 Orang /bulan	1.490.291.147,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Administrasi Keuangan	14 Orang /bulan	1.965.500.292,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100%	100%	100 %	0,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Administrasi Kepegawaian	100 %	36.600.000,00	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 orang	34 orang	34 orang	38 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Administrasi Kepegawaian	38 Orang	36.600.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran	100 %	100 %	100%	100 %	39.235.850,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Administrasi Umum Kantor	100 %	103.864.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2.368.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Administrasi Umum Kantor	12 Paket	3.500.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	8.938.650,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Administrasi Umum Kantor	12 Paket	24.729.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	7.165.200,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Administrasi Umum Kantor	12 Paket	21.000.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2.436.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Administrasi Umum Kantor	12 Paket	6.500.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10 Laporan	16.800.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Administrasi Umum Kantor	12 Laporan	43.635.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													

						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dok	12 Dok	12 Dok	6 Dokumen	1.528.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Administrasi Umum Kantor	12 Dok	4.500.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarana prasarana sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	0,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	62.500.000,00	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	30.000.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pengadaan Barang Milik Daerah	3 Unit	7.500.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	3 Unit	2 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pengadaan Barang Milik Daerah	4 Unit	25.000.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	406.480.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 %	434.400.000,00	

	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	21.000.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	12 Laporan	24.400.000,00	KEC. JENAWI	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	385.480.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	12 Laporan	410.000.000,00	KEC. JENAWI	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	30.250.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	90.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	4 Unit	8 Unit	9 Unit	27.450.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	9 Unit	40.000.000,00	KEC. JENAWI	
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	8 Unit	0 Unit	12 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Unit	3.500.000,00	KEC. JENAWI	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5 Unit	2 Unit	8 Unit	2.800.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	8 Unit	6.500.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	1 unit	0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2 unit	40.000.000,00	KEC. JENAWI
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	100 %	100 %	100 %	100 %	1.773.400,00						100 %	6.259.600,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	1.773.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pelayanan kepada Masyarakat	12 Kegiatan	6.259.600,00	
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	2 lap	2 lap	0 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pelayanan kepada Masyarakat	0 Laporan	1.987.800,00	KEC. JENAWI
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.773.400,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pelayanan kepada Masyarakat	12 Laporan	4.271.800,00	KEC. JENAWI

3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakata n Aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	9.248.850,00						100 %	15.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakata n yang dibina	7 Lembaga	7 Lembag a	7 Lembaga	7 Lembag a	9.248.850,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	7 Lembaga	15.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
						Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasya rakatan	7 Lembag a Kemasy arakatan	7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembag a Kemasy arakata n	4.454.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	7 Lembaga Kemasyara katan	5.500.000,00	KEC. JENAWI	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5 Laporan	4.794.850,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	12 Laporan	9.500.000,00	KEC. JENAWI	
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan konduusif	100 %	100 %	100 %	100 %	1.680.000,00						100 %	6.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketenteraman dan ketertiban umum	9 wilayah	9 wilayah	9 wilayah	9 wilayah	1.680.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 wilayah	6.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	12 laporan	12 laporan	1 Laporan	1.680.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	6.000.000,00	KEC. JENAWI
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	100 %	100 %	100 %	100 %	41.400.000,00					100 %	63.850.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	4 Kegiatan	3 Keg	3 keg	4 Kegiatan	41.400.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	4 Kegiatan	63.850.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 orang	0 orang	0 orang	160 Orang	17.130.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	250 orang	38.000.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	90 orang	120 orang	90 Orang	45 Orang	2.670.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	90 orang	5.250.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dok	0 dok	0 Dok	12 Dokumen	21.600.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	12 dok	20.600.000,00	KEC. JENAWI
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDDes yang sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	12.532.300,00						100 %	7.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki fasilitas pemerintahan desa sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	12.532.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Desa	100 %	7.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9 Dokumen	0 Dok	0 Dok	9 Dokumen	1.460.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Desa	9 Dokumen	1.000.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pemerintahan Desa	9 Dokumen	1.750.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	0 Dok	0 Dok	9 Dokumen	1.344.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Desa	9 Dokumen	1.000.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	3.360.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pemerintahan Desa	9 Dokumen	1.500.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	9 Dokumen	0 Dok	0 Dok	9 Dokumen	1.632.200,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pemerintahan Desa	9 Dokumen	1.000.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													

							Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Dokumen	0 Dok	0 Dok	3 Dokume n	536.100,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Desa	3 Dokumen	750.000,00	KEC. JENAWI	
JUMLAH												2.036.291.147,00								2.801.486.092,00	

4.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk kedepannya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Nilai IKM	Nilai	86,4

4.5 Program Kecamatan Jenawi yang Mendukung Prioritas Progam Pembangunan Daerah Tahun 2026

Berikut ini program/kegiatan/subkegiatan Kecamatan Jenawi yang mendukung prioritas Pembangunan daerah tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No.	Program Prioritas Kabupaten	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu
(1)	(2)	(4)	(5)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi	Program: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.1773.400
2	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air	Program: Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

		Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan: • Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp.17.130.000
--	--	---	---------------

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Jenawi Tahun 2025 - 2029 dalam target dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025- 2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jenawi harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Jenawi.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.
2. Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Jenawi Tahun 2026.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Kecamatan Jenawi yang telah diusulkan dan ditetapkan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jenawi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/*mindset*.

Semoga Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

